

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjungkarang Perkara Nomor
0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ABDUL HAMID

NPM. 1221010023

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/2017 M**

**DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjungkarang Perkara Nomor
0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
syarat-syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh



Pembimbing I : Drs. H. Khoirul Abror, M.H
Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH, MM

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/2017 M

ABSTRAK

DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjungkarang Perkara Nomor
0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk)

Oleh:

ABDUL HAMID

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi usia perkawinan, meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil diluar nikah. Perkara yang terjadi pada sidang putusan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk, dalam perkara tersebut menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ? dan Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari perspektif hukum Islam ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur yang ditempuh untuk mengajukan dispensasi nikah sebagai berikut: pemohon ke prameja untuk memperoleh penjelasan

tentang bagaimana cara berperkaradan cara membuat surat permohonan kemudian diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), Pemohon kemudian menghadap kepada kasir, pemohon kemudian menghadap pada Meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Selama proses persidangan pemohon harus menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk adalah : (a) pertimbangan hukum dan (b) pertimbangan keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yaitu untuk mencapai aspek tujuan hukum yang berorientasi pada asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Abdul Hamid
NPM : 1221010023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhiyah
Judul skripsi : Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Pa Kelas 1 A Tanjungkarang Penetapan NOMOR 0002/Pdt.P/2016/PA. Tnk)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2017


Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs.H,Khoirul Abror,M.H. NIP.195704031987031003 **Drs.H.Ahmad Jalalluddin,S.H.,M.M NIP. 195703051978031001**

Mengetahui,
Ketua Prodi Akhwal Al-syakhsiyah

Marwin,S.H.,M.H.
NIP. 197501292000031001

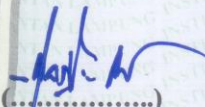

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

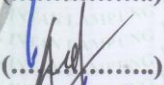
Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

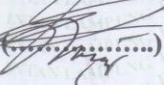
Skripsi dengan judul **DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjung Karang Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk), disusun oleh Nama: **Abdul Hamid Npm: 1221010023**, Jurusan **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah **Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung** Pada/Tanggal: **21 Februari 2017 Ruang Sidang II (Dua) Fakultas Syari'ah**.


TIM MUNAQOSAH


Ketua : Marwin, S.H., M.H.  (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I  (.....)

Penguji I : Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H  (.....)

Penguji II : Drs. H, Khoirul Abror, M.H.  (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 197009011997031002



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Q.S. Adzariyat : (51)49¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Mahkota, Surabaya, Edisi Revisi, 1996, hlm 2584.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
M O T T O.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10



BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Syarat Sahnya Perkawinan	18
4. Pelaksanaan Perkawinan	21
5. Tujuan Perkawinan.....	25
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih	28
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	32
C. Dispensasi Nikah	37
1. Pengertian Dispensasi Nikah	37
2. Dasar Hukum Dispensasi nikah	39
3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah.....	40
4. Prosedur Dispensasi Nikah	40

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PA Kelas 1 A Tanjungkarang	43
B. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjungkarang.....	50
C. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas 1A Tanjungkarang	51
D. Prosedur Pengajuan dispensasi nikah di PA Kelas 1A Tanjungkarang	53
E. Dispensasi Nikah di bawah umur berdasarkan pada Salinan Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk.....	59

BAB IV ANALISIS

A. Prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang	64
B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara nomor 0002/Pdt.P/2016.....	72



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Perkara Dispensasi Nikah
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
3. Tabulasi Jawaban Responden
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian
6. Foto dan Dokumen Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu diperjelas istilah dan ungkapan yang dianggap perlu. Judul skripsi ini adalah: Dispensasi Perkawinan dibawah umur ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjungkarang Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk)

Dispensasi perkawinan dibawah umur adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus. Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan terhadap batasan umur perkawinan. Menurut Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama²

Dispensai perkawinan dibawah umur dalam skripsi ini dibatasi pengertiannya pada putusan salinan putusan dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk.

²Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta, 2008, hlm 72.

Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.³

Hukum Islam menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah :

حِطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

Artinya : pembicaraan Syari' yang berubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berupa tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.⁴

Perspektif hukum Islam maksudnya adalah menelaah, meneliti apa yang telah diputuskan dalam perkara dispensasi nikah melalui kajian hukum Islam.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang putusan Pengadilan Agama terhadap izin perkawinan di bawah umur dalam nomor putusan 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.



B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, akan tetapi dengan berbagai kondisi dan situasi ada saja pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi batas usia minimal perkawinan sehingga diharuskan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Oleh karenanya

³ Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm 21

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Daar Al-Qalam, Kuwait, 1984, hlm 74

penelitian yang mengkaji tentang dispensasi nikah masih sangat diperlukan terutama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

2. Persoalan dispensasi nikah seakan-akan menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan hukum Islam, pembatasan perkawinan menyebabkan persoalan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi yang mampu dan siap untuk menikah terkendala dengan usia, seolah-olah Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir kondisi umat Islam dan ajaran Islam, hal inilah yang perlu diluruskan sehingga sangat penting kajian tentang dispensasi nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan program studi yang tekuni yakni Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Islam itu didukung dengan literatur yang memadai dan tempat penelitian yang mudah dijangkau.



C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada mahluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Allah SWT menganjurkan perkawinan dan perijodohan untuk meneruskan keturunan. Kalau datang agama pada manusia dan menganjurkan semua manusia kawin dan mengawinkan, maka yang demikian itu bukan suatu paksaan, tetapi berupa anjuran dan perintah yang sesuai dengan tabiat dan seruan jiwanya.

⁵ Sayyid Shabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hlm 9.

Allah menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, sehingga hubungan laki-laki dengan perempuan diatur dengan upacara *Ijab Qabul* dari adanya rasa ridho meridhoi dengan disaksikan oleh para saksi kedua pasangan tersebut.⁶ Allah adakan hukum sesuai dengan martabat manusia. Selain itu perkawinan sudah menjadi naluri kemanusiaan, yang merupakan kebutuhan jasmani dan rohani. Justru itu Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberi kepadanya jalan kecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan memberinya kekuatan Untuk mengatasi kemiskinan. Firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberiaan-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS : An-Nur (24) : 32.

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, dengan maksud tiada lain karena banyaknya faedah dan manfaat yang terkandung didalamnya, baik bagi diri pribadi maupun maupun masyarakat. Bahkan, dapat terjadi hubungan antara manusia itu secara harmonis, mawaddah dan warahmah baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, selalu saling membantu. Suami istri adalah dasr permulaan dari pada hubungan

⁶*Ibid*, hlm, 10.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Toha Putra, Semarang, 1989, hlm 549.

tersebut. Tanpa suami istri tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat dan seterusnya tidak akan ada negara. Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan meneruskan keturunan. Perkawinan merupakan suatu jalan untuk menuju suatu keluarga yang bahagia dan diridhoi Allah SWT.

Perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Maka Islam memberikan pedoman agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng. Karena hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam tatanan hukum Nasional Indonesia, tentu saja harus bisa mengimbangi dan menjawab permasalahan serta perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Peradilan itu mempunyai tugas yang mulia dan agung, karena dalam peradilan terkandung “menyuruh *ma'ruf* dan mencegah *munkar*”, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang *dzolim* untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan.



Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya adalah dispensasi nikah. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur

⁸Bambang Sutyoso, SH., HM., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005, hlm. 11.

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁹

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri.¹⁰

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Grafika Perss, Jakarta, 2012, hlm 2.

¹⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Gema Insani Perss, Jakarta, 2001, hlm 76

menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan/diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.¹¹

Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹²

Pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktik kawin yang ‘terlampau muda’, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 77

¹² K. Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm . 26.

¹³ *Ibid.*, hlm 26

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada Pengadilan Agama. Permohonan yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan alasan/diskresi hukum. Karena alasan hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.¹⁴

Pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi di masyarakat masih ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil diluar nikah.

Contoh kasus yang pernah terjadi pada sidang putusan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk, dalam perkara tersebut menimbang, bahwa

¹⁴*Ibid.*, hlm 26.

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk. Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk dirinya sendiri yang berumur 18 tahun alasan yang diajukan adalah bahwa pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang dekat (berpacaran) dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri.¹⁵

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, perlu dibahas dan dianalisis alasan-alasan hakim dalam dispensasi nikah dalam perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari perspektif hukum Islam ?



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

¹⁵Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, tahun 2016

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan dibawah umur pada nomor perkara 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk ditinjau dari perspektif hukum Islam

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam proses pengajuan dispensasi nikah

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga-lembaga peradilan, Kantor Urusan Agama yang secara khusus menangani masalah dispensasi nikah

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif kuantitatif. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan sebenarnya.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

Menurut sifatnya penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif yakni “sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya”.¹⁷ Dengan demikian penelitian ini fokusnya

¹⁶Kartni Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke VIII, hlm 32

¹⁷Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 22.

adalah penggambaran terhadap suatu gejala (prosedur pengajuan dispensasi nikah) secara detail sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Data dan Sumber

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.¹⁸

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk dokumen putusan perkara dispensasi nikah pada nomor 0002/Pdt.P/2016/Pa.Tnk

Data sekunder adalah data-data yang berkenaan dengan data penelitian yang sifatnya memperkuat data primer yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Kelas II A Tanjungkarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Agama dan Panitera Pengganti untuk memperoleh

¹⁸Lois Gootschalk, *Understanding History, A. Primer of Historical Method*, Terjemah Nograho Noto Susanto, UI Press, 1985, hlm 32.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 231.

informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah.

- b. Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis.²⁰ Bahan-bahan tertulis yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan yang berupa teori-teori tentang usia untuk melakukan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam pada khususnya.
- c. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan :

a. Editing

Editing merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau tidak sesuai.²² Proses pengoreksian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya mengenai dipenuhinya atau tidak instruksi sampling, kelengkapan pengisian, keseraian pengisian dan lain sebagainya.

b. Sistematisasi



²⁰Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet.III, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 135.

²¹Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 210.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 115

Sistematisasi merupakan upaya penyusunan data yang telah dihimpun diurutkan berdasarkan sumber dan jenis data sehingga penulisan lebih mudah dimengerti dan difahami maksudnya.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²³

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan analisis dan melakukan pembahasan secara deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis data berupa naskah, dokumen dan sifat-sifat hubungan antara fenomena, dengan cara menganalisis isi (*contents analysis*) dari data deskriptif tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh disusun sedemikian rupa sehingga dikaji dan dikupas secara sistematis. Karena

²³Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm 214.

sebagian data diperoleh itu merupakan data kualitatif maka teknik yang digunakan deskriptif analisis non statistik.



BAB II

BATAS UMUR MENIKAH DAN DISPENSASI PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sebagaimana perkawinan merupakan suatu cara yang di pilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Dapat diambil satu pengertian, perkawinan yaitu ikatan antara seorang laki-laki dan seprang perempuan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan agama. Menyebabkan halal bagi pasangan

bersangkutan melakukan hubungan seksual.²⁴ *Nikah* (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁵



Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.

Menurut Sajuti Thalib berpendapat, bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

²⁴M. Tahlib, *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam*, Irsyad Baitus Salam, Bandung 2000, hlm.14

²⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 1.

laki-laki dengan seorang perempuan. Bertujuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih menyayangi, tenteram dan bahagia”.²⁶

Nikah ditinjau dari segi *Syari'at* ialah pertalian hubungan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud agar dapat membentuk keluarga yang shaleh dan membangun masyarakat secara bersih.²⁷ Dalam kata-kata Arab hanya sedikit sekali perbedaan dalam kata nikah, yang berarti akad atau mengikat tali perkawinan atau persetubuhan dengan isterinya.

Dengan demikian akad atau perjanjian yang lebih dikenal dengan perkawinan dapat diartikan menurut bahasa ialah bercampur dan berkumpul, maksudnya bercampur dan berkumpul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual secara halal.²⁸

Jadi dengan demikian perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami-isteri yang sah, membentuk keluarga yang kekal dan abadi. Unsur-unsur umumnya meliputi sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera dalam arti *ma'ruf, sakinah mu'awaddah* dan *rahmah*.

²⁶*Ibid.*, hlm. 2.

²⁷M. Shaleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Daud, *Perkawinan Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 1.

²⁸Ramayulis, dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, hlm. 17.

- c. Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik moral maupun materiil dan spiritual.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan menurut Fiqih munaqahat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS : An-Nisa' (4) 13²⁹)

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 167.

Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَبْلًا لَّنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur". QS : Al-A'raf (7) : 189.³⁰

b. Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْهَجَاءَ فَعَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. Hadits No:993.³¹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ ، وَاتَّقَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

³⁰ Ibid., hlm 287.

³¹ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya, 1991, hlm. 29

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi

Dasar Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam: Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalilzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³³



3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sah perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun-rukun, yaitu sighad (akad), wali, saksi dan mahar. selain itu sebelum akad nikah atau

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 4

³³ *Ibid.*, hlm 6.

sesudahnya diadakan khutbah nikah. khutbah nikah bukanlah merupakan syarat sah perkawinan melainkan suatu anjuran yang lebih utama.

Seperti halnya syarat sahnya perkawinan harus didasarkan atas perjanjian keada calon mempelai.³⁴ keterangan rukun-rukun tersebut, yaitu:

- a. “*Sighad*” (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama....., jawab pihak laki-laki (mempelai) saya terima menikahi.....”³⁵

Ijab adalah perkataan atau pernyataan pihak calon isteri, bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. dan qabulnya adalah pernyataan atau jawaban calon suaminya, bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya untuk menjadi isterinya.³⁶

- b. Wali (wali si perempuan) “Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan dengan wali atau yang menjadei wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah”.³⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan

³⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 1983, hlm. 83.

³⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 95

³⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999, hlm. 76.

³⁷Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, hlm. 97.

tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinan batal”.³⁸ (HR. Empat orang ahli Hadits kecauali Nasa’i).

- c. Ada saksi perkawinan yang melihat perkawinan itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil, Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi yang adil”.³⁹

- d. Adanya *mahar* (maskawin)

Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. hukumnya wajib bagi pria memberikan mahar (maskawin) kepada wanita calon isterinya.⁴⁰

Pemberian mahar dari seorang pria kepada calon isterinya merupakan cerminan kebulatan tekadnya untuk hidup bersama. jadi mahar ini wajib dipenuhi dan juga harus sudah memberikannya. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan”.

QS : An-nisa (4) : 4.⁴¹

Adapun besar kecilnya mahar tidak ditentukan jumlahnya, tergantung pada kemampuan masing-masing. Namun meskipun demikian Allah SWT dan

³⁸Shahih Bukhari, Jilid IV, terj. KH. A. Wahid Hasyim, Widjaya, Jakarta, Cet. 7, 1993, hlm. 13.

³⁹Abd. Rahman Dahlan, *Op.Cit.*, hlm 98.

⁴⁰Zuhdi Muhdlor, *Mentaati Hukum Perkawinan*, Al-Batan, Bandung, 1999, hlm. 44.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 119.

Rasulullah SAW melarang pemberian mahar secara berlebih-lebihan. sabda

Rasulullah SAW:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَكْثَرَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ
أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةً) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: ""Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang ringan belanjanya dan maskawinnya." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.⁴²

Demikianlah ajaran Islam yang sebaik-baiknya diikat oleh orang yang mencari ridlo Allah SWT. Dengan kata lain, mahar boleh diadakan dengan tidak terbatas tetapi harus sesuai dengan kemampuan.

4. Pelaksanaan Perkawinan

Upacara perkawinan adalah kegiatan yang didalamnya terdapat acara yang menjadi syarat sahnya perkawinan, acara tersebut adalah akad nikah. akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi tiga hal. Ketiga dari syarat tersebut yaitu: ijab Kabul, mahar dan saksi.⁴³ Setelah melakukan akad nikah hendaklah kedua mempelai mengadakan *Walimatul 'Urusyi* (perayaan), yang diutamakan dalam acara walimah adalah makan bersama oleh orang-orang yang turut menyaksikan akad nikah dan biasanya walimah diadakan setelah melakukan akad nikah pada hari dan jam yang sama. Walimah sendiri adalah acara makan bersama yang dilakukan setelah akad nikah.⁴⁴ Walimah



⁴² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cairo, 1952, hlm 74.

⁴³ M. Thalib, *Op, Cit.*, hlm. 84.

⁴⁴ M. Thalib, *40 Petunjuk menuju Perkawinan Islam*, Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1995, hlm. 156.

nampaknya berbeda dengan apa yang kita kenal dengan resepsi perkawinan. Hukum mengadakan walimah adalah sunah. sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْفٍ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى)

Artinya: “berkata Rasulullah saw kepada Abdurrahman bin ‘Auf (sewaktu dia nikah), adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing”. (HR. Bukhari Muslim)⁴⁵

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman bin ‘Auf untuk melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing. tidak harus walimah dengan acara yang besar-besaran.

Seperti halnya dalam memberikan maskawin, pada saat walimah tidak ada batas yang jelas. Namun berdasarkan hadits-hadits yang ada Rasulullah SAW sendiri selalu mengadakan walimah yang sangat sederhana. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَأَيْتَ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى)

Artinya: “dari Shafiyah binti Shabalah ra. ia berkata: Nabi Muhammad saw mengatakan: “Walimah pengantin sebagai isteri dengan dua mud air”.(HR. Bukhari)⁴⁶

Upacara akad perkawinan disebut “*Walimatul Urusyi*” yang kini dikenal dengan resepsi pernikahan.⁴⁷ Telah dijelaskan di atas, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin ‘Auf agar menyelenggarakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan walimah adalah tidak memaksakan diri untuk berwalimah, melainkan sesuai dengan kemampuan.

⁴⁵Kamal Mukhtar, *Op.Cit.*, hlm. 108.

⁴⁶Shahih Bukhari, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁴⁷Zuhdi Muhdlor, *Op.Cit.*, hlm. 63.

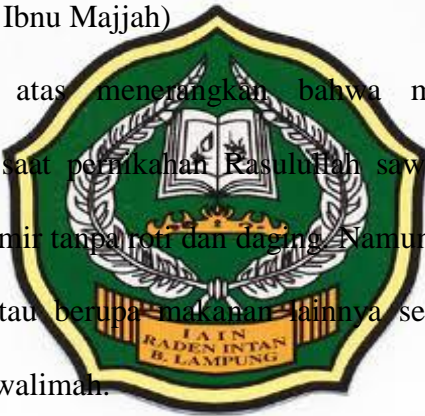
Undangan hendaknya tidak dibedakan antara si kaya dengan si miskin, yang berpangkat tinggi maupun rendah dan lain sebagainya, semuanya harus dilakukan sama.⁴⁸ Kita harus dapat mengetahui bahwa pada dasarnya yang dianjurkan adalah mengadakan walimah, sedangkan bahan makanan yang kita gunakan dalam walimah adalah bebas dipilih, apabila sanggup, kita boleh menghidangkan makanan semampu kita.

Hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ujarnya, sesungguhnya Nabi Muhammad saw mengadakan walimah ketika kawin dengan Syarifah dengan makanan gandum dan kurma”.⁴⁹ (HR. Ibnu Majjah)

Hadits di atas menerangkan bahwa makanan walimah yang dihidangkan pada saat pernikahan Rasulullah saw dengan Syarifah berupa kurma, susu dan samir tanpa roti dan daging. Namun demikian walimah boleh daging kambing atau berupa makanan lainnya sesuai dengan kemampuan yang mengadakan walimah.



Sebuah kisah orang yang mengadakan walimah dalam perkawinan yang terjadi pada masa Rasulullah saw:

Banyak contoh pada zaman sahabat, walimah diadakan dengan sangat sederhana, bahkan hanya beberapa piring kurma saja. Karena walimah itu wajib dikerjakan dan dilakukan oleh orang yang mengadakan perkawinan, maka bahan makanannya disesuaikan dengan kemampuan orang yang mengadakan perkawinan. Kemudian apakah dalam walimah orang-orang yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴⁹ M. Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 155.

melakukan perkawinan harus mengeluarkan sendiri atau orang lain boleh membantu mengadakan walimah tersebut. Rasulullah saw tidak menekankan hal tersebut, beliau tidak pula melarang orang lain ikut membantu seseorang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimah. Oleh karena itu kaum muslimin dapat melakukan perkawinan dan membantu mereka mengadakan walimah guna menyamaratakan perkawinan mereka. Dengan demikian walimah yang menjadi walimah yang menjadi kewajiban dalam upacara perkawinan itu dapat dilakukan saudara kita dengan baik.⁵⁰

Rasulullah Saw menganjurkan walimah namun melarang dari sifat berlebihan yang menjurus pada kemubaziran. Walimah dipertahankan karena memang diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan ialah mengadakan walimah dan menyiarkan perkawinan. Walimah adalah suatu etika dari sekian banyak etika yang dianjurkan dalam acara penyerahan pengantin.

Walimatul ‘*Urusyi* (perayaan) gunanya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sepasang suami isteri telah melakukan ikatan perkawinan. Dengan demikian masyarakat dapat menjadi saksi dan melakukan pengontrolan terhadap orang-orang yang akan mengganggu keluarga baru ini.⁵¹ Pemberitahuan perkawinan sepasang suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang dibina kepada masyarakat merupakan anjuran.

Jika calon pengantin wanita mengucapkan *ijab* (penawaran), maka pengantin laki-laki menjawab dengan ucapan *qabul*. Kemudian dilakukan khutbah nikah, sebagai nasehat suami isteri untuk bekal dalam mengarungi lautan samudra rumah tangga bagai meniti pulau cita-cita.⁵² Itulah makanya dianjurkan walimah (perayaan), sebagai dasar anjuran dari Rasulullah SAW. Dengan adanya walimah secara otomatis antara keluarga pria dan wanita serta masyarakat lingkungan berkumpul menyaksikan perkawinan tersebut.

Aadapun yang dimaksud dengan menyiarkan perkawinan ialah memberitahukan atau mengumumkan kepada masyarakat agar perkawinan yang telah dilakukan oleh seseorang diketahui oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan atau khalayak ramai. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Turmudzi, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِيُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الْقُوفَ. (رواه أحمد والترمذی)

Artinya: “siarkanlah perkawinan (nikah) dan adakanlah di masjid dan pukullah rebana”.⁵³

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 157.

⁵¹Ramayulis, *Loc, Cit.*,

⁵²Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewrisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 21.

⁵³M. Thalib, *Op, Cit.*, hlm. 101.

Pelaksanaan penyiaran atau resepsi perkawinan itu tidak boleh berlebihan, segala sesuatunya harus disesuaikan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh ajaran Islam, agar perkawinannya mendapat berkah dari Allah SWT.

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT. Terutama dalam pergaulan dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang berisi sekurang-kurangnya seorang suami dengan isterinya. Kesempurnaan keluarga bermaksud memperoleh keturunan yang sah dalam suatu masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram serta teratur.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.⁵⁴ Dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Perkawinan dapat mencegah perzinahan dan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa suami isteri, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Pernikahan yang dilaksanakan menurut penggarisan agama Islam terkandung beberapa tujuan yang mulia dan suci, yaitu:

- a. Membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia yang dilaksanakan dengan cinta dan kasih sayang.

⁵⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Op.cit.*, hlm. 27.

Firman Allah SWT :

وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berpikir”. QS : Ar-Rum (30) : 21.⁵⁵

- b. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan kegairahan dalam bekerja dan rasa tanggung jawab serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran hidup.
- c. Menjaga keselamatan umat.
- d. Mengembangbiakan umat manusia turun temurun.
- e. Menjaga kesopanan dan perbedaan manusia.⁵⁶



Selain itu masih terdapat tujuan yang lain diantaranya, menjaga dan memelihara wanita yang bersuamikan lemah dari kebinasan. Andai kata tidak ada pernikahan tentunya wanita menjadi sasaran pelepas hawa nafsu bagi kaum pria. Untuk mendapatkan keturunan yang sah lagi suci. Apabila spasang suami isteri melahirkan keturunan maka keturunan tersebut jelas asal-usulnya.

Manusia dijadikan Allah SWT hidup berjodoh (berpasangan). Dengan perjodohan manusia dapat melakukan pengembangbiakan jenisnya melalui pernikahan. Hanya dengan melalui pernikahan manusia dapat memelihara

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 172

⁵⁶Ramayulis, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 21.

eksistensinya sehingga dapat memakmurkan dan memelihara dunia ini dengan sebaik-baiknya.

Tentang perkawinan itu sendiri secara garis besar bertujuan sebagai berikut:

- a. Guna mendapatkan ketengan hidup.
- b. Guna menjaga kehormatan diri dari pandangan mata.
Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya: Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: rasulullah saw bersabda: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama). Barangsiapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai bagi dirinya”.(HR. Bukhari dari Ibn Imamah).
- c. Guna mendapatkan keturunan. Seperti sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

تَزَوُّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَحْمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَةِ النَّضَارِي (رواه البخاري)

Artinya: “Kawinlah kamu, sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku dengan sebab kamu kepada umat-umat (lain), dan janganlah kamu menjadi seperti pendeta-pendeta kaum Nasrani”.(HR. Bukhari).⁵⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk mempererat dan membererat hubungan kekeluargaan serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.



B. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Allah SWT berfirman :

⁵⁷ Shahih Bukhari, *Op.Cit.*, hlm. 8.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ...^ط

Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.... QS : An-Nisa (4) : 6.⁵⁸

Sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan / memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁵⁹



Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan

⁵⁸Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁵⁹M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 37.

sebgainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulam' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁶⁰

Maliki, Syaff'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya denga bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas

⁶⁰Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁶¹

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan perasaan. Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁶²

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mu'allaq*). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (*mani*) bagi laki-laki.
- c. Haid (*menstruasi*) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁶³

Menurut kitab *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan

⁶¹M. Abdul Mujieb, et.al, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁶²Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, 1998, hlm.351-352.

⁶³Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁶⁴

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.



Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah

⁶⁴Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232-233.

kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
 - 1) beragama Islam;
 - 2) laki-laki;
 - 3) jelas orangnya;
 - 4) dapat memberikan persetujuan;
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:
 - 1) beragama Islam
 - 2) perempuan;
 - 3) jelas orangnya;
 - 4) dapat dimintai persetujuan;
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan⁶⁵

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batas usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Diesbutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hlm 29.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶⁶

Ketentuan batas umur ini seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.



Berdasarkan salah satu dari 8 asas prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali

⁶⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang terikat dalam perkawinan.⁶⁷

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (d) KHI. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁶⁹



Hikmah *Tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*), di samping itu pernikahan adalah fitrah dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon

⁶⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 173.

⁶⁸Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 249.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 233.

mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.⁷⁰

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechtsfeit*), seperti yang telah dikutip oleh Muhammad Amin Suma dari Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, yakni : “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.”⁷¹

Sebagai fakta yang ditemukan dalam perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI).

Apabila menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fikih*) mengenai penentuan usia kawin, perlu dipertimbangkan metode *maṣālah mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Namun, metode tersebut pada waktu dan tempat tertentu member dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, akibat adanya sesuatu atau lain hal perkawinan dari usia muda atau kurang dari

⁷⁰Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *op. cit.*, hlm. 213-214.

⁷¹Muhammad Amin Suma, *Op. cit.*, hlm. 81.

ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang dimaksud tetap memberikan peluang, yaitu Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisiten di satu sisi, yaitu pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.



C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Nikah ialah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan ajaran agama. Dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁷²

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Raihan Rosyid dalam karyanya, *Hukum Acara Peradilan Agama* menulis, Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan.⁴⁰ Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁷³



Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban; di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah: tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan

⁷²Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta, 2008, hlm 72.

⁷³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, *Op.Cit.*, hlm 32.

perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.⁷⁴

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K. wanjik Saleh dalam karyanya, *Hukum Perkawinan Indonesia*, juga menulis, apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkan suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*, yakni: *maslahah* yang secara eksplisit tidak satu pun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.⁷⁵ Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan

⁷⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 90.

⁷⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 284.

tersebut tidak bersifat kaku. Artinya ketentuan UU Perkawinan tentang batas usia pernikahan, bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, misalnya: calon mempelai wanita telah dalam keadaan hamil. Harus segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga. Meskipun *masalah mursalah* dapat dijadikan dalil hukum dan *hujjah syari'ah*, tetapi perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, kriteria yang telah disepakati, hendaknya dipegang teguh dalam aplikasinya dan hal ini harus disadari bahwa mengistinbat hukum itu pekerjaan mujtahid yang tidak boleh lepas dari persyaratan yang telah ditentukan para mujtahid.

2. Dasar Hukum Dispensasi nikah

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.⁷⁶



b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1

⁷⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT.RinekaCipta, Jakarta,1994, hlm. 209

Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷⁷

3. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

c. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di taksir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

d. Persyaratan husus.⁷⁸

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy surat ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

4. Prosedur Dispensasi Nikah

⁷⁷Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 19

⁷⁸Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 *Op.Cit*, hlm 102.

Tentang prosedur dispensasi nikah ini, berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Permohonan dispensasi nikah bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri yang belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (Permenag No. 3/1975 Pasal 13 (1)). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka masing-masing; (Permenag No. 3/1975 Pasal 13 (2)).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (Permenag No. 3/1975 Pasal 13 (3)). Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan; (Pasal 13 ayat (4) Permenag No. 3/1975).

Sedang pengertian penetapan secara terminologi bahasa Arab disebut *al Isbat* atau *beschiking* dalam bahasa Belanda. Yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena

di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*). Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada perbedaannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun dimuat identitas termohon, tapi termohon bukanlah pihak.
- b. Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti pada putusan.
- c. Amar penetapan bersifat *declaratoire* atau *constitutoire*
- d. Jika putusan diawali kata “memutuskan”, maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.
- e. Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat.
- f. Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PA Kelas 1 A Tanjungkarang

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.



Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syaria'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjungkarang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.⁷⁹

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai,

⁷⁹Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/ perselisihan masyarakat.

Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tiddak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.



Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)

2. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)⁸⁰

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, daerah hukum dan tugas serta wawenangnya.



Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 Januari 1947 itu meliputi :

1. Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kishwah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
2. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka(waris) yang dilaksanakan secara Islam.
3. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
4. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.
5. Mengurus soal-soal perbadatan.
6. Memberi fatwa dalam berbagai soal.⁸¹

⁸⁰Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

⁸¹Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama dan Biro peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil, Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah keresidenan lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI".

Surat Kementerian Kehakiman itu ditunjukkan Kepada Kementerian dalam Negeri. Kemudian Kementerian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan

Lampung di Tanjungkarang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syri’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melaui surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementrian Agma C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musywarah antara Kementrian Agama dan Kementrian Kehakiman di Jakarta”.⁸²

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Peengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementrian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negri di Jakarta.⁸³

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang

⁸² *Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016*

⁸³ *Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016*

kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
2. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954.
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.⁸⁴

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang



⁸⁴ Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁸⁵

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan

⁸⁵ *Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016*

Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

B. Visi dan Misi PA Kelas 1A Tanjungkarang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, beribawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.⁸⁶

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.



Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjungkarang untuk mewujudkan Visi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.

⁸⁶Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.⁸⁷

C. Struktur Organisasi dan Tupoksi PA Kelas 1A Tanjungkarang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Kelas IA sebagai berikut :

Tabel 1

Struktur Organisasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Abu Thalib Zisma	Ketua Pengadilan
2	Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Asma Zainuri, S.H.	Hakim
4	Dra. Hj. Maimunah A.R., S.H., M.H.	Hakim
5	Drs. Syamsuddin, M.H.	Hakim
6	Drs. H. Abuseman Batoni, S.H.	Hakim
7	Dra. Hj. Maisunah, S.H.	Hakim
8	Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.	Hakim
9	Djauhari, S.H.	Hakim
10	Drs. Firdaus. MA.	Hakim
11	Drs. H. Mumamad Nuh, S.H., M.H.	Hakim
12	Dra. Mulathifah, M.H.	Hakim
13	Drs. H. Hasan Faiz Bakry.	Hakim
14	Drs. Ahmad Nur, M.H.	Hakim
15	Drs. A. Nasrul, MD.	Hakim
16	Drs. Wasyhudi, M.Hum.	Hakim
17	Itna Fauza Qadriyah, S.H, M,H.	Panitera
18	H. Sulaiman Marzuki, S.H.	Wakil Panitera
19	Deska Fitrah, S.H, M.H.	Panitera Muda Permohonan
20	Dra. Husnidar.	Panitera Muda Gugatan
21	Syukur, S.Ag	Panitera Muda Hukum
22	Nelmi Rodiah Harahaf, S.H.	Panitera Pengganti

⁸⁷ Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

23	Mahmilawati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
24	Dra. Hj. Maisarah.	Panitera Pengganti
25	Linda Hastuti, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
26	Amnia Burmelia, S.H.	Panitera Pengganti
27	Hj. Elok Diantina, S.H.	Panitera Pengganti
28	Rosmiati, S.H.	Panitera Pengganti
29	Astri Kurniawati, S.H.	Panitera Pengganti
30	Eliyanti Suri, S.Ag, M.H.	Panitera Pengganti
31	Anika Rahmah, S. Ag.	Panitera Pengganti
32	Nursiah, S.Hi.	Panitera Pengganti
33	Vivi Wanty, S.H.	Panitera Pengganti
34	Rahmatiah Oktafiana, S.Hi.	Panitera Pengganti
35	M. Djulizar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti
36	Senioreta Mauliasari, S.H.	Panitera Pengganti
37	Dra. Nelfirdos, M.H.	Panitera Pengganti
38	Sudiman, S.H.	Sekretaris
39	Anis Khoirunnisa, S.Ag.	Kasub Per Tek. Info Pel
40	A.Fathurrohman, S.H, M.H.	Kasub Kepeg, Organi dan TA
41	Indria Yulisa, S.E.	Kasub Umum & Keuangan
42	M. Rosyidi.	Juru Sita
43	Ahmad Subroto, S.H, M.H.	Juru Sita
44	Himbauan, S.H, M.M.	Juru Sita
45	Ari Eka Putra, S.H.	Juru Sita
46	Haryati	Juru Sita
47	Ali Haidar, S.H.	Juru Sita
48	Mega Oktaria, A.Md	Juru Sita
49	Sri Widaryan, S.E, M.H.	Juru Sita Pengganti
50	Mulyati, S.H.	Juru Sita Pengganti
51	Dwi Astuti, S.Pdi.	Juru Sita Pengganti
52	Dra. Masturah.	Juru Sita Pengganti
53	Nurhayati, S. Hi.	Juru Sita Pengganti
54	Adriyadi, S.H.	Juru Sita Pengganti
55	Mulyati, S.H.	Arisiparis
56	Yasir, S.H.	Pranata Computer
57	Sri Widaryani, S.E, M.H.	Bendahara

Sumber : Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang per Oktober 2016

Struktur organisasi yang dibentuk pada PA Kelas 1A Tanjungkarang

bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.⁸⁸



D. Prosedur Pengajuan dispensasi nikah di PA Kelas 1A Tanjungkarang

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara mengajukan permohonan, antara lain sebagai berikut dibawah ini:

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang sebagaimana dijelaskan oleh Panitera PA Kelas 1A Tanjungkarang Itna Fauza Qadriyah, S.H, M.H adalah sebagai berikut:

1. Prameja

⁸⁸ Dokumentasi PA Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2016 dicatat tanggal 1 Oktober 2016

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempa dan pembuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
- e. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.



3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.



Selama proses persidangan hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

1) Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

a) Bukti tertulis. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

b) Bukti saksi. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keterangan: seorang saksi tanpa ada pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya,
- (2) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri,



(3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian

(4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitu; pada perilaku kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

c) Persangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

d) Pengakuan. Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan



hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

- e) Sumpah. Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.⁸⁹



Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang berdasarkan observasi langsung yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.

⁸⁹Itna Fauza Qadriyah, S.H, M.H, Panitera PA Kelas 1A Tanjungkarang, *wawancara*, tanggal 07 Oktober 2016

2. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
4. Majelis hakim mendamaikan para pihak.
5. Apabila upaya hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalam hal perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
6. Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tertulis.
7. Pembuktian.
8. *Konklusi* (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum memberi putusan.
9. Putusan
10. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
11. Dalam perkara voluntair tidak ada replik dan duplik.⁹⁰



E. Dispensasi Nikah di bawah umur berdasarkan pada Salinan Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Adapun perkara yang dimaksud adalah Nomor 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk.

⁹⁰Observasi tanggal 7 Oktober 2016

Penetapan Nomor perkara 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Dispensasi Nikah yang diajukan oleh: P, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di: X, Kecamatan X, Kota X. sebagai PEMOHON.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang dengan register Nomor: 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk tanggal 27 Januari 2016.

Dalam positanya pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan seorang wanita yang bernama XXX tersebut mau melangsungkan pernikahan, akan tetapi pemohon belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 18 tahun.
2. Bahwa pemohon sudah berpacaran selama empat bulan dengan XXX dan mendesak untuk dinikahkan karena pemohon sudah melakukan hubungan suami isteri dengan XXX.
3. bahwa pemohon dengan XXX sudah sepakat untuk menikah.
4. Bahwa alasan pemohon akan segera menikahkan xx dan yy adalah syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi pemohon belum mncapai 20 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon



dari pemohon telah sudah hamil 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa pemohon bersetatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, agar berkenan membuka persidangan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada xx untuk melangsungkan perkawinan dengan xxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan pemberian nasehat agar pernikahan pemohon

dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon bernama xx telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan menyatakan bahwa ia mengaku telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang kepala Keluarga untuk anak-anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang kepala Keluarga yang baik, dan ia sangat mencintai calon isterinya, lebih dari itu hubungan keduanya telah sulit untuk dipisahkan dan keluarga masing-masing pihak telah setuju dan merestuinnya.

Bahwa calon isteri bernama xxx telah didengar keterangannya dihadapan sidang, ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, dan hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan.



Bahwa masing-masing calon suami atau isteri menyatakan dirinya tidak ada hubungan persaudaraan satu dengan yang lain, baik sedarah maupun semeda.

Bahwa, wali nikah (ayah) calon mempelai wanita yang bernama ZZ telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan telah menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya, karena

kedua calon mempelai telah saling mencintai bahkan calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan serta akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan untuk menikah, antara mereka berdua tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon bernama xx untuk menikah dengan seorang wanita bernama xxx
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-

Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 19 April 2016. (salinan putusan terlampir)



BAB IV

ANALISIS

A. Prosedur Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang

Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang secara ringkas sebagai berikut:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.
2. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
4. Majelis hakim mendamaikan para pihak.
5. Apabila upaya hakim tidak berhasil maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalam hal perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
6. Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tertulis.
7. Pembuktian.
8. *Konklusi* (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum memberi putusan.
9. Putusan
10. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
11. Dalam perkara voluntair tidak ada replik dan duplik .



12. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pemohon diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk mencantumkan alasan-alasan dalam surat permohonannya, karena Undang-undang tidak menentukan alasan-alasan dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi seperti dalam pengajuan perkara perceraian.



Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di buat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup

umur (*baligh*). Dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Kitab *Safinatun Najah* menyebutkan tanda-tanda *baligh* (dewasa) ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

UU Perkawinan No. 1 Th 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Sayangnya undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah.



Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat, seperti al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Berhubung dengan hal itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimum, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Sayangnya undang-undang tidak merinci apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim adalah individu yang tidak dapat di pengaruhi oleh institusi lain, termasuk atasan dalam

dinasnya. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim akan tampak jelas dalam membuat putusan dan atau penetapan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Pada satu sisi hakim mengadili berdasarkan hukum dan wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Bahkan menurut Pasal 22 ABg (*algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) yang masih berlaku berdasar Pasal II aturan peralihan UUD 1945, hakim dapat dituntut karena menolak mengadili. Oleh karena itu ketika hukum undang-undang (*legislative law*) tidak ada, hakim dengan kemerdekaan yang diberikan oleh konstitusi mempunyai otoritas untuk membuat hukum sendiri, yang dikenal dengan istilah *rechterechts judge made law*.

Penetapan putusan oleh hakim terutama pada kasus yang sama sekali belum ada hukumnya. Dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya, hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan pada saat yang sama, hakim juga diperkenankan untuk melakukan *contra legem*, apabila ketentuan dalam undang-undang dinilai tidak relevan lagi dan dapat menciderai rasa keadilan masyarakat.

Meskipun dalam melakukan *contra legem*, hakim harus membuat pertimbangan yang radikal dari berbagai aspeknya. Kemerdekaan dan otoritas



yang dimiliki hakim untuk melakukan *contra legem*, dengan sendirinya melahirkan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Semula populer adagium hakim sebagai corong undang-undang (*la bounche de la loi*). Adagium tersebut sudah tidak relevan lagi, karena undang-undang yang merupakan hasil legislative *power*, selalu ketinggalan dengan perkembangan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan memerlukan kebebasan dan otoritas untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang, mencari dan menemukan asas hukum, menciptakan hukum baru yang benar-benar mencerminkan keadilan masyarakat.

Untuk dapat mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan hukum, Hakim harus dapat memilah dan memilih rasio *decidendi* (analogi) dan *obiter dicta* (*obiter dicta*). Rasio *decidendi* adalah (analogi) faktor yang esensial sebagai dasar pertimbangan hakim menuju pada satu putusan tertentu. Apabila faktor tersebut berbeda maka pertimbangan hukum hakim akan berbeda dan putusannya pun akan berbeda pula. Dengan rasio/analogi *decidendi* dapat dicontohkan, apabila dalam suatu perkara terdapat faktor esensial a, b dan faktor tidak esensial c maka hakim akan menjatuhkan putusan x. Oleh karena itu apabila dalam suatu perkara ditemukan faktor esensial a, b dan d, maka putusan hakim tidak mungkin x lagi. Jadi suatu peraturan perundang-undangan diterapkan pada suatu peristiwa tertentu yang



tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu.

Obitter dicta (*obitter dicta*) adalah kebalikan dari rasio decidendi. Artinya, *obitter dicta* bukan faktor yang esensial, tetapi hanya faktor menegaskan dalam satu perkara. *Obitter dicta* tidak menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Jadi *argumentum a contratrio* adalah cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu, untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Dalam kasus perceraian *obiter dicta* misalnya suami sering pergi untuk bekerja adanya jalinan cinta suami dengan pihak ketiga. Untuk sampai kepada putusan cerai, hakim akan mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak, dengan memperhatikan faktor esensial. Dalam kasus ini, faktor esensial adalah adanya pihak ketiga sedangkan suaminya pergi merupakan *obitter dicta*. Sebab ternyata terungkap dalam persidangan suami memang selama ini sering pergi ke luar kota untuk berbisnis, akan tetapi sejak berhubungan cinta dengan wanita lain, suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah memilah mana rasio *decidendi* dan mana *obiter dicta*, hakim memilih hukum yang tepat untuk perkara ini yang menjadi faktor esensial terjadinya perselisihan dan pertengkaran.



Sejalan dengan itu sebaik apa pun suatu undang-undang tidak pernah bisa terus menerus mengikuti perubahan masyarakat yang bersifat dinamis. Ini mengandung arti bahwa hukum harus bisa mengikuti perubahan masyarakat dan yurisprudensi menjadi penting artinya dalam menghindari kemandekan hukum dan dalam menegakkan rasa keadilan masyarakat. Maka perlu adanya kreatifitas dan inovasi dalam menafsirkan teks peraturan. Teks peraturan adalah benda mati yang harus ditafsirkan oleh para aktor hukum ketika dibaca. Bahasa selalu memiliki sifat multi tafsir, yang artinya dalam teks peraturan tidak akan pernah terwujud kepastian karena tidak ada namanya kepastian di dalam teks sehingga pekerjaan menerobos teks pada dasarnya merupakan pekerjaan mencari makna yang lebih dalam lagi untuk menemukan keadilan yang terkandung di dalam suatu teks peraturan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Nomor 0002/Pdt. P/2016



Pertimbangan hakim dalam penetapan putusan perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/P.A.Tnk diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah:

- a. Bukti surat terdiri dari : 1) Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan. 2) Surat

Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Barat.

- b. Bukti saksi adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang. Namun karena dalam perkara ini perkara permohonan dispensasi kawin, maka saksi hanya kalau diperlukan saja.

Penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim merujuk pada hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah qaidah ushul fiqih yang menyebut : *“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan.”* Dan *“Kemadharatan harus dihilangkan.”*

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan karena dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.



2. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri. Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang bakal di lahirkan.

Mengingat hal tersebut tidaklah kecil arti putusan peradilan agama dalam pembangunan sistem hukum nasional melalui pembinaan yurisprudensi yang baik dan teratur. Sebagaimana yurisprudensi dari lingkungan peradilan lain, yurisprudensi peradilan agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaran atau hukum Islam. Dalam sistem Islam terdapat tiga komponen fundamental yang berkaitan erat antara satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang intergal, adalah *aqidah*, *syari'at*, dan *akhlak*, yang akan menjelma dalam bentuk yang lebih konfrehensif.

Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya Muhammad saw, untuk disampaikan kepada segenap umat di sepanjang masa dan seantero jagat raya, yang pada hakikatnya merupakan sistem *akidah* dan

tata *kaidah* yang mengatur perikehidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama. Hukum perkawinan merupakan bagian integral syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup bermah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah mengisi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.



Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terdapat nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", artinya suatu ikatan janji yang kokoh, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan

kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum nikah dan ijabkabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib; demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.



Perkara dispensasi nikah Nomor. 0002/Pdt.P/2016/P.A. Tnk. secara gamblang telah jelas bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kehamilan. Dan sebagai bentuk pertanggung jawabannya dari pihak pria, pria tersebut mau menikahi wanita pujaan hatinya. Namun ketika mendaftarkan rencana pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Barat setempat ditolak, dengan alasan salah satu pihak calon mempelai yakni Calon mempelai pria belum

mencapai batas minimal usia perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu untuk pria 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Kemudian tanpa orang tua (calon mengajukan permohonan atas nama sendiri) mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjungkarang supaya dapat menikahkan mereka, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Peran tersebut dapat dijalankan oleh Peradilan Agama mengingat ruang lingkup wewenangnya yang terbatas dibandingkan dengan lingkungan peradilan yang lain. Kesempitan formal tersebut sebenarnya mengandung kekuasaan material. Hukum perkawinan dapat dipandang sebagai inti hukum kekeluargaan. Demikian pula hukum waris dapat dipandang sebagai inti hukum kebendaan atau hukum harta kekayaan. Dalam hal yang demikian, yurisprudensi peradilan agama dalam kedua bidang tersebut dapat mempunyai pengaruh yang berarti terhadap aspek lain dari hukum kekeluargaan dan hukum harta kekayaan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam judul Pernikahan dibawah umur ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PA Kelas 1A Tanjungkarang Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk) serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang sebagai berikut: sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, pemohon kemudian menghadap pada Meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Proses selanjutnya diagendakan untuk sidang, selama proses persidangan pemohon harus menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.



2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah perkara nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnk adalah : (a) pertimbangan hukum dan (b) pertimbangan keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, yaitu untuk mencapai aspek tujuan hukum yang berorientasi pada asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemadaratan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadaratan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadaratan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun, bila kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadaratan yang lain maka haruslah memilih kemadaratan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Selain untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan, juga untuk menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat.



B. Saran

Untuk perbaikan dimasa yang akan datang alangkah baiknya bila para hakim Pengadilan Agama lebih mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat dan negara, dengan upaya-upaya pembinaan dan

penyuluhan di sekolah-sekolah baik di SLTP/SLTA dan pada masyarakat umum kota maupun desa terkait dengan perkawinan di bawah umur dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan pemahaman tentang hukum perkawinan serta akibat dan dampak perkawinan di bawah umur dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kohar, Mas'ud Hasan, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan 12, 2002
- Bambang Sutiyoso, SH., HM., M.Hum., Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH., *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005
- Bukhari, Shahih, Jilid IV, terj. KH. A. Wahid Hasyim, Widjaya, Jakarta, Cet. 7, 1993
- Departemen Agama RI *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 1983
- , Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Jakarta, 2008
- , Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta, 1985
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit Toha Putra, Semarang, 1989
- Idris Ramulya, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan ke VIII, 1997
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009
- Lois Gootschalk, *Understanding History, A. Primer of Historical Method*, Terjemah Nogroho Noto Susanto, UI Press, 1985
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006

- Muhammad, Suma Amin *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muhdlor, Zuhdi, *Mentaati Hukum Perkawinan*, Al-Batan, Bandung, 1999
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ramayulis, dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang, tahun 2016
- Saleh, Wantjik *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Shabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- Shaleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Daud, *Perkawinan Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001
- Tahlib, M. *30 Petunjuk Perkawinan dalam Islam*, Irsyad Baitus Salam, Bandung 2000
- Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet.III, Rajawali, Jakarta, 1990
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, 1998
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Grafika Perss, Jakarta, 2012
- Wahab Khalaf, Abdul ' *Ilm Ushul al-Fiqh*, Daar Al-Qalam, Kuwait, 1984

